

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017-2021

Nengsi Puspita Sari¹⁾, Alisman^{2*)}

¹⁾Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

²⁾Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

*Corresponding author

Email: alisman@utu.ac.id*, nengsipuspita485@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia merupakan negara yang memiliki 34 provinsi, dimana Aceh ialah salah satu provinsi yang terdapat di negara tersebut. Kabupaten Simeulue ialah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dimana letak dari pada Kabupaten Simeule berada di lepas pantai Barat Aceh kurang lebih 150 km. Samudera Indonesia merupakan tempat berdiri tegaknya Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue ialah kabupten pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, dimana hal ini terjadi pada tahun 1996, sejak peningkatan status dan peresmian pada tahun 1999. Sinabang merupakan ibu kota dari pada Kabupaten Simeulue. Perintisan Simeulue menjadi Kabupaten telah dilakukan sejak lama, dimana hal ini merupakan keinginan dari pada leluhur masyarakat Simeulue sendiri. Terbentuknya Kabupaten Simeule menjadi sebuah Kabupaten dilaukan melalui praksa sejumlah tokoh dan masyarakat.

Tujuan yang di capai pada penelitian ini ialah mengetahui pengaruh dari pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Program Pengentasan Kemiskinan pada Periode 5 tahun mulai dari 2017 sampai dengan 2021. Penggunaan metode Analisis Data Statistik Regresi Linear Sederhana memudahkan peneliti untuk memperoleh hasil yang diinginkan, data yang ada pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue.

Koefisien regresi yang diperoleh sebesar 4,248E-8 pada nilai signifikannya sebesar 0,259 > 0,05. Dimana hal yang ditunjukkan adalah koefisiennya bernilai positif, makna yang diperoleh disini yaitu ada hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan, dimana jika Dana DAU mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan pula pada tingkat Kemiskinan. Jumlah Dana Alokasi Umum yang besar di Kabupaten Simeulue sangat mempengaruhi jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. Hasil R square yang diperoleh yaitu sebesar 39,2% dimana hal ini dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh. Dimana nilai t hitungnya yaitu sebesar 1,389 yang berarti berada di daerah penerimaan H_a . Nilai F hitung 1,931 > F tabelnya adalah 1,918, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu variabel bebas (X) saling berkaitan dengan variabel terikat (Y) dimana memiliki artinya Dana Alokasi Umum yang ada di Kabupaten Simeulu berpengaruh terhadap Kemiskinan masyarakat.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Kemiskinan

1. Pendahuluan

Kemiskinan Pada akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Simeulue, Dari hasil penelusuran PRI pada Website BPS Simeulue Minggu 13/2/2022, jumlah penduduk miskin sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dihimpun

BPS, di tahun 2017 tercatat ada sebanyak 18.220 jumlah penduduk yang miskin, tahun 2019 sebanyak 17.677, tahun 2020 sebanyak 17.341 namun pada tahun 2021 angkah kemiskinan tercatat sebanyak 18.250. Angkah kemiskinan di tahun ini naik dibanding dua tahun sebelumnya. Data tersebut dijelaskan di update pada bulan maret setiap tahunnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Simeulue Agus Andria, SST, M.Si di konfirmasi membenarkan bahwa data di atas sudah benar, dan pada tahun 2021 diakui angka kemiskinan memang mengalami kenaikan akibat Pandemi Covid -19 yang melanda (BPS, Simeulue)

Salah satu tujuan dari pada suatu negara adalah pembangunan. Peningkatan dari pada pembangunan dapat membuat suatu negara menjadi semakin maju. Indikator keberhasilan pembangunan dapat digunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, dimana tingginya pertumbuhan ekonomi maka mampu meminimalkan pengangguran ataupun kemiskinan (Rustam 2010).

Kemiskinan ialah masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan terutamanya bagi Negara yang Sedang Berkembang, hal ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh Sartika et al. 2016. Tingkat kemiskinan di suatu negara ataupun daerah ialah cerminan untuk melihat tingkat Kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara ataupun daerah tersebut (Christianto, 2013).

Perkembangan era globalisasi yang begitu pesat ternyata masi menimbulkan berbagai paradigma kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Upaya pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan telah menempuh berbagai cara, dari pemberian bantuan modal usaha, pembangunan daerah dan program transmigrasi, namun hal tersebut belum mencapai hasil yang maksimal (Soebagyo & Prasetyoningrum, 2017).

Menurut (Fadila, 2020) penyebab dari pada kemiskinan adalah rendahnya tingkat kreativitas dari pada masyarakat, dimana hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya akses pendidikan yang di terima oleh masyarakat. Mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah perlu meningkatkan indikator pembangunan secara merata, salah satunya dalam bidang ekonomi agar memperoleh sumber daya manusia yang produktif (Ningrum et al., 2020) maka dari itu diperlukan skla ekonomi yang dijadikan sebagai pedoman ukuran terhadap pembangunan masyarakat secara merata.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis membuat sebuah penelitian dengan judul "Pengaruh dana DAU terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten simeulue tahun 2017-2021.

2. Kajian Teoritis

Dana Alokasi Umum (DAU)

Suatu daerah pasti memiliki sumber pendapatan daerah, dimana salah satu sumber pendapatan suatu daerah ialah Dana Alokasi Umum (DAU), dimana dana ini ialah bagian dari pada Dana Perimbangan. Pengalokasian dari pada Belanja Modal yang ada di suatu daerah mampu dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) ini. Penggunaan dari pada Dana Alokasi Umum (DAU) sepenuhnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Adapun penjelasan yang menggambarkan tentang Dana Alokasi Umum (DAU) ini telah ada dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, dimana sumber dari pada Dana Alokasi Umum ini ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tujuan diberikannya dana ini yaitu sebagai pemerataan dari pada kemampuan keuangan yang ada diantar daerah, hal ini dilakukan dalam rangka sebagai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pada suatu daerah.

Dana Alokasi Umum di seluruh kabupaten dan kota diberikan oleh pemerintah untuk mengisi kesenjangan dari pada kapasitas dan kebutuhan fiskal yang dibutuhkan oleh kabupaten dan kota. Secara umum, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima dana yang lebih jika dibandingkan dengan daerah yang kaya. Dana Alokasi Umum ialah Dana yang bersumber dari pada pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah, tujuan dari pada dana tersebut adalah untuk mengisi kesenjangan kapasitas dan kebutuhan di setiap daerah. Prinsip dari pada pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut adalah untuk tercapai pemerataan kemampuan keuangan antara setiap daerah (Kuncoro, 2014).

Peran Dana Alokasi Umum (DAU)

Peran dari pada Dana Alokasi Umum (DAU) sangatlah signifikan untuk proses pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) sangatlah membantu Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan agar dapat terpenuhinya standar pelayanan publik yang ada di daerah tersebut. Pelayanan kepada publik dapat terpenuhi dari dana yang diberikan tersebut dapat digunakan untuk memberikan.

Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah pusat menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah dengan tujuan, sebagai berikut: (Indraningrum, 2011):

- a. Menciptakan keadilan di setiap wilayah (*geographical equity*);
- b. Meningkatkan akuntabilitas yang ada di setiap wilayah (*promote accountability*);
- c. Meningkatkan sistem pajak menjadi lebih progresif, dimana banyak sistem pajak daerah masih kurang progresif;
- d. Meningkatkan penerimaan (*acceptability*) pajak daerah. Dimana pemerintah pusat dapat mensubsidi beberapa pengeluaran dari pada pemerintah daerah sendiri.

Sedangkan menurut Halim (2016) tujuan dari dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

Tujuan dari pada Dana Alokasi Umum dapat mengurangi tingkat ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan daerah, dimana DAU dapat memberikan kepastian bagi daerah dalam hal pembiayaan kebutuhan yang menjadi tanggung jawab daerah, dimana sekarang-kurangnya ialah 26%.

Antara satu provinsi dengan provinsi lainnya ketimpangan dalam ekonomi tidak dapat dihindari. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya alam dan sumber pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan penanggulangan ketimpangan dengan memberikan subsidi berupa Dana Alokasi Umum kepada daerah.

Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)

Prinsip dasar dari pada Dana Alokasi Umum menurut Siregar (2016) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kecukupan merupakan prinsip yang mendasar dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum.
2. Harus netral dan efisiennya sistem yang digunakan dalam pengalokasian.
3. Dana Alokasi Umum haruslah akuntabilitas, pelepasan dana tersebut ke daerah merupakan hal yang tepat, karena pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat berkaitan dalam menentukan pengalokasian dana.
4. Sistem Alokasi Dana haruslah mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana yang telah termaktupkan dalam Undang-undang.
5. Dalam pengalokasi Dana Alokasi Umum sikap Keadilan haruslah menjadi prinsip dasar hal ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
6. Transparansi dan objektivitas dimana dalam sistem alokasi Dana Alokasi Umum harus

didasarkan pada upaya dalam meminimumkan kemungkinan manipulasi akan dana yang telah diberikan.

7. Kesederhanaan rumusan alokasi Dana Alokasi Umum harus sederhana (tidak kompleks).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada setiap daerah banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Dimana hal tersebut telah termaktubkan dalam Peraturan Pemerintahan No.14 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, antara lain:

1. Tentang Alokasi dasar, dimana termaksud juga jumlah PNS pada suatu daerah.
2. Jumlah penduduk pada daerah tersebut.
3. Luas dari pada wilayah daerah tersebut.
4. Pendapatan daerah yang diperoleh setiap tahunnya, yang diperoleh setiap tahunnya.
5. Dana yang diperoleh setiap tahunnya dari pemerintah yaitu Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Sebagaimana termaktubkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 27, tentang ketentuan dari pada perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu:

1. Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) sekarang-kurangnya yaitu 26% (dua puluh enam persen) dimana perolehan dana tersebut telah ditetapkan dalam APBN yang diperoleh dari hasil pendapatan bersih dalam negeri.
2. Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) ini disesuaikan antara provinsi dan kabupaten/kota, dimana perhitungannya dilakukan dengan perbandingan antara bobot urusan pemerintah sendiri, dimana hal tersebut menjadi aturan dari pada pemerintah pusat.
3. Pada point 2 (dua) yaitu tentang penentuan proporsi dapat dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana proporsi dari pada DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai sebuah imbalan dengan proporsi 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
4. Penetapan secara seluruhnya jumlah DAU yang dimaksudkan pada point 1 seluruhnya telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Kemiskinan

Kotze dalam Hikmat (2004:6) menyatakan bahwa sumber yang tersedia relatif lebih baik diperoleh oleh masyarakat

miskin. Hal tersebut lebih baik digunakan oleh masyarakat miskin dikarenakan dukungan dari pihak luar sangatlah bermanfaat bagi mereka. Namun, pemberdayaan dana yang tidak tepat, mengakibatkan masyarakat tidak mampu untuk berkembang, sehingga pengisolasian dalam masyarakat kerap terjadi. Pengisolasian yang kerap terjadi menimbulkan banyak sikap pasif, dimana masyarakat menjadi semakin miskin.

Kemiskinan menurut Supriatna (2011) ialah kondisi seseorang yang mempunyai batasan dalam berkehendak serta bersikap. Tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan tingkat pendapatannya serta tingkat kesejahteraan hidup. Penyebab dari pada kemiskinan sendiri sangatlah banyak, baik itu dari tingkat pendidikan formal ataupun pendidikan nonformal, hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar dalam dunia pendidikan informal.

Indikator Kemiskinan

Kemiskinan sendiri ialah gejala yang kompleks, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan dimensi ekonomi. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi lain yang ada diluar ekonomi, dimana kemiskinan sendiri sering disebutkan dengan konteks ketidak kecukupan dalam memenuhi kebutuhannya, baik pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, serta kesehatan (Nanga, 2006:36).

Lembaga yang pertama sekali mempublikasikan tentang tingkat kemiskinan yaitu BPS. Dimana publikasi tersebut dilakukan pada tahun 1984, data yang pertama sekali dilakukan yaitu pada periode 1976-1981 yang mencakup tentang kemiskinan. Dimana pihak BPS mulai menghitung jumlah persentase dari pada penduduk miskin setiap tiga tahun sekali. Penduduk yang ada pada batas tertentu, secara garis besarnya disebut miskin. Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila mampu memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan sangatlah berhubungan dengan nilai rupiah, dimana seseorang dapat dikatakan mampu memenuhi kebutuhannya apabila mampu memenuhi kebutuhannya sebesar 2100 kalori/hari.

Penyebab Kemiskinan

Sesuatu yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan menurut Soebagyo (2013) yaitu:

1. Penyebab individual, dimana untuk melihat tingkat kemiskinan seseorang dapat dilihat

dari akibat dari pada perilaku ataupun pilihan dari pihak yang bersangkutan.

2. Penyebab dari pada keluarga, dimana kemiskinan sendiri sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh dari pihak keluarga.
3. Penyebab dari pada sub-budaya (subcultural), dimana hal ini menghubungkan antara kebiasaan sehari-hari dari pada seseorang dengan tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Penyebab dari pada agensi, dimana hal ini dapat dilihat melalui tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh aksinya sendiri, baik itu peperangan, krisis ekonomi ataupun ulah pemerintah.
5. Penyebab struktural, dimana kemiskinan dihasilkan dari pada struktural sosial seseorang.

Di tinjau dari segi ekonomi, pandangan tentang kemiskinan ialah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu dari segi pangan maupun non pangan. Kemiskinan meruakan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara. Masalah tentang kemiskinan ini dapat di atasi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana konsep yang dilakukan yaitu pembangunan ekonomi (Atalay, 2015).

Perbaikan dalam sektor ekonomi telah banyak dijelaskan dalam hal pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi sendiri telah banyak membawa perbaikan, seperti pemberantasan tentang kemiskinan serta penerapan standart pendidikan yang lebih untuk membawa kepada kemajuan (Cremin & Nakabugo 2012). Kekuatan pendorong yang dapat menghasilkan kekayaan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dimana hal tersebut nantinya akan memberantas kemiskinan serta menyelesaikan segala masalah yang menyertainya (Cremin & Nakabugo 2012). Pendidikan sendiri merupakan investasi yang mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan sangatlah penting, dimana dengan mendidik anak-anak miskin, peluang yang sangat tinggi akan menjauhkan anak-anak tersebut dari kemiskinan (Word Bank).

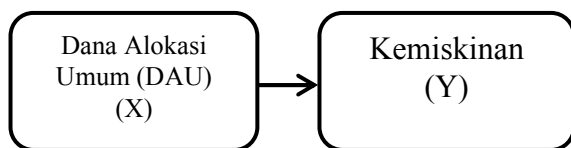
IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan. IPM sendiri ialah indeks komperhensif yang mampu menggambarkan ciri-ciri dari tingkat pembangunan manusia yang ada pada suatu daerah ataupun negara. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur IPM sendiri ialah tingkat pendidikan, kesehatan

serta pendapatan (Yakunina RP & Bychkov GA 2015).

Kemiskinan merupakan hal yang harus diperhatikan, banyak para ahli menyebutkan penanggulangan dari pada kemiskinan sendiri secara jituanya dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang produksi pada suatu daerah, hal ini dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kedepannya (Yacoub 2012). Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan membuka lapangan pekerjaan, sehingga mampu mengurangi pengangguran dan mampu meingkatkan kualitas hidup dari pada masyarakat.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau yang sering disebut dengan kerangka berfikir yang digunakan ada penelitian ini berfungsi untuk memecahkan masalah. Kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah, dimana banyak hal yang diperlihatkan pada kerangka berfikir ini, baik itu tentang hubungan antara variabel ataupun pengaruh pada analisisnya. Adapun skema kerangka konseptual yang berkaitan dengan tujuan penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

4. Metodologi

Pengaruh dari pada Dana Alokasi Umum terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Simeulue dapat diketahui dengan cara analisis dengan menggunakan statistik, hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengukur pengaruh dari pada X (Dana Alokasi Umum) terhadap Y (Kemiskinan) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linear Sederhana.

Regresi linear sederhana merupakan regresi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, regresi ini sangat cocok digunakan dalam hal pengestimasi hubungan antara dua. Regresi linear ini membuat satu asumsi tambahan yang nantinya akan mengkorelasikan antara variabel independen dan dependen.

Adapun definisi regresi linear sederhana menurut Sugiyono (2011) yaitu regresi linear yang memiliki dasar dari pada hubungan

fungsional/kausal suatu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Cara Hitung Regresi Linear Sederhana yaitu:

$$Y=a+b X \quad Y_i=a+bX_i+e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen atau terikat (Variabel Responden atau Variabel Akibat).

Y_i = Kemiskinan (jumlah penduduk miskin dalam ribuan jiwa).

a = Konstanta (Taksiran penduduk miskin tetap setiap tahunnya).

b = nilai Koefisien regresi (kemiringan) jumlah penduduk miskin akibat perubahan dana alokasi umum.

X₁ = Dana Alokasi Umum (dalam ribu rupiah).

e = Kesalahan Penaksiran (error term).

I = Periode Observasi 2017-2021.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Fungsi dari pada koefisien determinasi (R²) yaitu untuk mengetahui tingkat dari pada ketepatan yang paling baik digunakan pada analisa regresi. Dilakukannya pengujian koefisien determinasi tujuannya yaitu mengukur kemampuan dari pada model, dimana hal tersebut dilakukan untuk menerangkan seberapa berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal yang diindikasikan dalam hal ini ialah yaitu nilai adjusted R-Squared (Ghozali,2016).

Dalam koefisien determinasi (R²) ini akan diperoleh sebuah nilai yang akan digunakan untuk mengukur besar dari pada sumbangan yang ada pada beberapa variabel X terhadap variasi naik turun dari pada variabel Y, hal tersebut sering kali dipersentasekan menggunakan alat bantu SPSS.

5. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berikut ini data besarnya Dana Alokasi Umum pertahun yang ada di Kabupaten Simeulu dalam periode 5 (lima) 2017-2021:

Tabel 1. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021

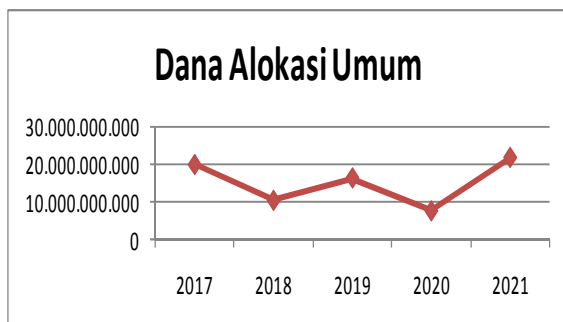
Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp)
2017	19.764.920.000
2018	10.181.800.000
2019	16.186.156.700
2020	7.386.630.000
2021	21.700.030.389

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulu

Dari tabel di atas memperlihatkan besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten Simeulue selama 5 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2017 Dana Alokasi Umum yang diterima sebesar Rp.19.764.920.000, di tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp.10.181.800.000, di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.16.186.156.700, dan di tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar Rp.7.386.630.000, selanjutnya di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.21.700.030.389.

Dari data-data yang diperoleh dan telah dijabarkan sehingga dapat dilihat bahwa jumlah Dana Alokasi Umum Kabupaten Simeulue dengan jumlah dana terbesar yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp.21.700.030.389, jumlah yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya.

Dari Tabel 1 di atas juga dapat di sajikan dalam bentuk Grafik yang dapat memperlihatkan data perbedaan Jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima Pertahunnya mulai dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan periode 5 tahun



Grafik 1. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021

Grafik di atas memperlihatkan secara jelas peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Kabupaten Simeulue dalam periode 5 tahun mulai dari tahun 2017-2021. Dari grafik di atas titik tertinggi yaitu pada tahun 2021 dan dana terendah di terimah pada tahun sebelumnya yaitu 2020.

Keadaan Kemiskinan

Data Jumlah penduduk Miskin atau Kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten simeulue selama 5 Tahun yaitu 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021

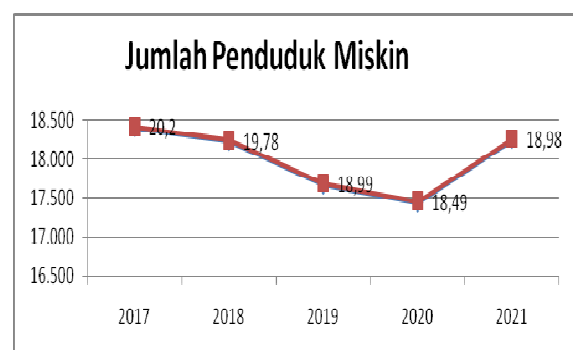
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Perkembangannya (%)
2017	18.398	20,20
2018	18.221	19,78
2019	17.670	18,99
2020	17.440	18,49
2021	18.250	18,98

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Simeulue.

Dapat dilihat pada tahun 2017 berjumlah yang ada di Kabupaten Simeulue ialah 18.398 jiwa, ditahun 2018 berjumlah 18.221 jiwa dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sekitar 17.670 jiwa, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sekitar 17.440 jiwa. Di tahun 2021 penduduk miskin mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 18.250 jiwa.

Tabel di atas merupakan perhitungan persentase dari pada penduduk miskin yang ada di Kabupaten Simeulue, dimana jumlah penduduk tersebut dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 20,20 %, sedangkan penduduk miskin di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 19,78%, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan yaitu sebesar 18,99%, dan di tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 18,49%, dan di tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu sebesar 18,98%.

Untuk melihat lebih jelas kenaikan atau penurunan jumlah penduduk miskin di kabupaten simeulue dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini :



Grafik 2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021

Grafik Garis di atas menunjukkan perubahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simeulue selama periode 2017 sampai dengan 2021, terlihat naik dan turunnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Simeulue. Dari grafik garis di atas dapat dilihat jumlah penduduk miskin terbesar yaitu pada tahun 2017 dan angka jumlah penduduk miskin terendah pada tahun 2020

Keterkaitan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengentasan Kemiskinan

Untuk melihat keterkaitan Dana Alokasi Umum terhadap kemiskinan di Kabupaten Simeulue adalah berdasarkan data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue maka digunakan pengujian Regresi Linear Menggunakan Aplikasi SPSS di peroleh data yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,626 ^a	,392	,189	374,672

a. Predictors: (Constant), Dana DAU

Berdasarkan data dari tabel di atas besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yang diperoleh yaitu 0,626, sedangkan output yang diperoleh dari koefisien determinasi (R Square) yaitu sebesar 0,392, dimana hal tersebut yang mengandung arti bahwa variabel bebas (Dana DAU) berpengaruh terhadap variabel terikat (Kemiskinan) dengan peroleh nilai sebesar 39,2%. Adapun sisa yang diperoleh yaitu 60,8%, dimana hal tersebut mengandung artian bahwa satu variabel di pengaruhi oleh variabel lain atau faktor lainnya.

Tabel 4. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	271020,40	1	271020,400	1,93	,259 ^b
Residual	421136,40	3	140378,800		
Total	692156,80	4			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Pada Tabel di atas nilai F hitung yang diperoleh yaitu sebesar 1,93. Dengan taraf signifikan 0,259 > 0,05. Untuk mengetahui nilai F tabel maka harus mengetahui nilai df1 dan df2. Diperoleh df1 = 1 dan df2 = 3, dengan taraf signifikan mendekati 0,26, sehingga nilai F tabel sebesar = 1,918. Dari data yang diperoleh menunjukkan F hitung > F tabel yaitu 1,93 > 1,918. Maka dapat disimpulkan variabel Dana DAU (X) berpengaruh terhadap variabel

Kemiskinan (Y) yang artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemiskinan

Tabel 5: Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	17356,7	489,528	
	Dana DAU	4,25E-08	0	0,626

Pada tabel (Coefficient) pada kolom B pada constant (a) adalah 17356,700. Sedangkan nilai Dana DAU (b) adalah 4,248E-8. Sehingga persamaan/model regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX \text{ atau } 17356,700 + 4,248E-8X$$

Adapun membaca nilai persamaan regresi di atas yaitu:

Nilai konstanta yang diperoleh yaitu sebesar 17356,700, hal ini menunjukkan pengaruh yang positif pada variabel independen (Dana DAU).

Koefisien regresi X sebesar 4,248E-8 menyatakan bahwa jika Dana DAU (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka Kemiskinan (Y) mengalami peningkatan sebesar 4,248E-8.

a. Penutup

1. Koefisien regresi yang diperoleh yaitu 4,248E-8 pada signifikan 0,259 > 0,05. Dari hal tersebut maka yang diperoleh yaitu koefisien bernilai positif. Maka, hal tersebut mengartikan bahwa terjadi hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan. Dana DAU yang meningkat akan memberi peningkatan terhadap tingkat Kemiskinan.
2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simeulue dipengaruhi oleh besarnya jumlah Dana Alokasi Umum, dimana hal tersebut dapat dilihat dari hasil R² square sebesar 39,2%.
3. Nilai t hitung yang diperoleh yaitu sebesar 1,389 dimana hal ini menggambarkan penerimaan pada daerah Ha

Daftar Pustaka

- Abdul Halim (2016), *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2016.
- Atalay, R. (2015). Science Direct The education and the human capital to get rid of the middle-income trap and to provide the

- economic development. *Procedia-Sosial and Behavioral Sciences*.
- Cremin, P. & Nakabugo, M.G. (2012). Education, development and poverty reduction: A literature critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4).
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Indraningrum, Try. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kuncoro, Mudrajat, (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga: Jakarta.
- Nanga, Mauna. (2005). *Ekonomi Makro: Teori, Masalah dan Kebijakan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Sabar. (2016). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Soebagiyo, Daryono. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Sukarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cetakan. Ke Delapan.
- Supriatna, Tjahya, (2011). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*.
- Yacoub, Y., (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak*, 8(3).
- Yakunina RP & Bychkov GA, (2015). ScienceDirect Correlation Analysis Of The Components Of The Human Development Index Across Countries. *Procedia Economics and Finance*, 24 (July).